

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

2 0 2 6

Jl. Soekarno-Hatta No. 50

Telp. 031-3095331

BANGKALAN 69116

Web : www.dispendukcapilbkl.com

eMail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331
B A N G K A L A N

Kode Pos 69116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
188.45/ 20 /433.109/2025
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra 2024-2026 dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Surat Edaran Bersama (SEB) No.008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
11. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor : 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Tanggal 30 Mei 2017;
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026;
25. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45/20/433.109/2021 tentang Renstra Dispendukpencapil periode 2024-2026

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 14 Agustus 2025

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**



ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perencanaan PD selama satu Tahun dan merupakan penjabaran per Tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 14 Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN



ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Pendahuluan.....
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum.....
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4	Review terhadap Rancangan Awal.....
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Propinsi
3.2	Tujuan dan sasaran Renja PD
Bab IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
4.1	Program dan Kegiatan.....
Bab V	Penutup.....

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapak kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 6/E);
20. Peraturan Daerah Bangkalan Perubahan Nomor 3 Tahun 2021 atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76;
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan
22. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor/.....)
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 seri E);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja 2026 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 serta evaluasi kinerja di tahun 2025 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2024-2026 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2026 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2025

Secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2025 sebesar Rp 6.947.318.163,- dengan 5 program dan 32 Sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 1.277.149.879,- sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 5.670.168.284,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 18,38%.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2026

Sedangkan untuk rencana anggaran tahun depan yakni Anggaran tahun 2026 sesuai dengan usulan RKPD total Belanja Langsung sebesar Rp 6.787.958.385,- terurai dalam 5 program dan 32 Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan Kegiatan Tahun 2026, dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dikhususkan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah yang ada untuk melayani pemohon.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan untuk bidang pelayanan masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan dilingkungan Dispenduk dan Pencapil belum bisa dikatakan pelayanan prima.

d. Minat Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan relative masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat mengurus penerbitan dokumen kependudukannya pada saat dibutuhkan saja.

e. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas melalui pendidikan kader, maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh PD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	76	0	76	76	1	77	153	2,013157895
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9		3	3	1	3	6	0,666666667
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-							-
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	-							-
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3		1	1	1	0	1	0,333333333
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3		1	1	1	0	1	0,333333333

2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		1	1	1	1	2	0,666666667
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28		12	12	1	0	12	0,428571429
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46		50	50	1	46	96	2,086956522
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3		1	1	1	0	1	0,333333333
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	102		66	66	1	18	84	0,823529412
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91		7	7	1	0	7	0,076923077
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-							
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-							
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-							

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5		1	1	1	0	1	0,2
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		2	2	1	0	2	0,166666667
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		1	1	1	0	1	0,2
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6		2	2	1	0	2	0,333333333
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6		2	2	1	0	2	0,333333333
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36		12	12	1	0	12	0,333333333
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124		48	48	1	3	51	0,411290323
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-		-	-	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-		-	-	

2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-		-	-	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-		-	-	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7		3	3	1	0	3	0,428571429
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-		-		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6		2	2	1	1	3	0,5
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	12	1	6	18	0,5
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	12	1	6	18	0,5
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	300	3
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20		20	20	1	2	22	1,1
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108		50	50	1	0	50	0,462962963

2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4		-	-		-	-	
2.12.01.2.013	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	-		-	-		-		
2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-		-	-	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El	99,7	95,57	99,5	99,47		99,6	294,64	2,955265797
		Persentase kepemilikan KIA	53	34,82	51	42,62		52	129,44	2,442264151
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	98%	97%	97,50%	97,50%		98%	2,925	2,984693878
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3		1	1	1	1	2	0,666666667
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	15		5	5	1	5	10	0,666666667
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	98,50%		97,50%	97,50%	97,50%	98%	1,955	1,984771574
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12		4	4	1	0	4	0,333333333

2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	2		2	2	1	2	4	2
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-		-	-		-	-	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	161036		161.000	161.000	1	0	161000	0,999776448
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-		-	-	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran								
		Persentase penerbitan akte perkawinan								
		Persentase penerbitan akte perceraian								
		Persentase penerbitan akte kematian								
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	98,50%		97,50%	97,50%	1	98%	1,955	1,984771574
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	3		1	1	1	0	1	0,333333333

2.12.03.2.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	4	4	4	1	4	8	2
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Penting Terkait Pencaatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait PencatatanSipil	-	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	150	150	150	1	0	150	1
2.12.03.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	1	2	2
2.12.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan yang Telah Dilakukan	5	3	3	1	0	3	0,6

2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	1		1	1	1	1	2	2
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3		1	1	1	1	2	0,666666667
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3		1	1	1	1	2	0,666666667
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1		1	1	1	1	2	2
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4		2	2	1	1	3	0,75
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54		18	18	1	0	18	0,333333333
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	-	-	-	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4		4	4	1	1	5	1,25
2.12.05	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100	100	100	100	1	100	300	3
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1		1	1	1	1	2	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	-		-	-	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1		1	1	1	1	2	2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) Orang Kepala Bidang. **Adapun deskripsi kerja masing - masing adalah sebagai berikut :**

A. Sekretariat

a. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

b. Fungsi

Selain mempunyai tugas pokok sekretariat juga mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelola administrasi kepegawaian;
3. Pengelola administrasi keuangan;
4. Pengelola asset dan barang milik Negara / daerah;
5. Pengelola urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol ;
6. Pengelola koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
9. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
10. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dan Sub koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional , yaitu :

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik Negara dan barang milik daerah;
- e. Melakukan penyiapan bahan laporan kinerja pejabat structural;
- f. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub. Bagian Keuangan;

Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan verifikasi;
- b. Menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP);
- c. Menyiapkan bahan surat perintah membayar (SPM) uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), tambah uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- d. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Melaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan realisasi anggaran;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan asset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;

- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
- j. Menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- k. Menyiapkan Dokumen Penunjang yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya;
- l. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris .

B. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengna tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Bidang Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknonogi informasi dan komunikasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- f. Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovaasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027	
	(Masukkan Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	(Masukkan indikator SPM)										
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			91,50%	89,81%	89,83%	95,80%	89,79%	92%	92,50%	92,50%	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		74,8%	74,9%	75,0%	65,2%	71,1%	74,9%	75,0%	75,0%	
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99,6%	99,7%	99,8%	92,08%	98,3%	99,7%	99,8%	99,8%	
		Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data		100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil										
		Indeks Kepuasan Masyarakat		85	86	87	87,23	85,46%	86	87	87	
		Nilai SAKIP		61	61,50	62	61.65	63.05	61,50	62	62	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawainya. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.
3. Sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat keterlibatan pemerintah sangatlah penting.
5. Banyaknya masyarakat (pemohon) yang mengurus penerbitan dokumen kependudukan harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan masing-masing bidang sehingga dapat tercapai kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.
6. Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dinilai masih rendah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya pengembangan yang digunakan dan tingkat melek masyarakat terhadap TIK serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah.
7. Mengikuti kebijakan yang ada pada juknis penggunaan DAK non fisk pelayanan administrasi Kependudukan yang terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya tidak diperbolehkan menggunakan anggaran DAK untuk pengadaan sarana dan prasarana juga kegiatan yang dibatasi pendanaan DAK non fisik dari Direktrat Jendral Kependudukan dan dan pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Review terhadap rancangan awal tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	78	5.938.799.511	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	78	5.130.215.175	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.067.119	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.389.552	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2.897.219	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2.953.300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.200.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.169.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dok	1.089.250	

								Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1.566.802	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	1.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	1.300.050	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.280.000	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.372.255.119	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.085.862.141	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org	4.363.941.019	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org	4.081.731.441	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2.630.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2.630.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Lap	5.683.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Lap	1.500.000	
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	733.650	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Lap	733.650	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Lap	500.000	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	305.820.538	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	39.957.550	

	Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	947.424.000	Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	872.308.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	3.810.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	1.994.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	128.454.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	122.454.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	815.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	747.860.000	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	300.630.985	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	118.494.482	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	112.565.985	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	111.094.482	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	8.065.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	7.400.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	180.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan KTP El	99.5%	826.686.400	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan KTP El	99.5%	109.253.210	
		Kab. Bangkalan	Persentase kepemilikan KIA	63%			Kab. Bangkalan	Persentase kepemilikan KIA	63%		
	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	756.892.900	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	66.219.400	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	1 Dok	14.364.650	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	1 Dok	15.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dok	742.528.250	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dok	51.219.400	

	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	100%	25.802.500	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	100%	-	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	25.802.500	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-	
	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	4 Keg	43.991.000	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	4 Keg	43.033.810	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Orang	43.991.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Orang	21.001.300	
	Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	-		Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan	1 Lap	22.032.510	

								pendaftaran penduduk			
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk			
	Program Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	97.25 %	98.681.502	Program Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	97.25%	1.510.000.000	
		Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perkawinan	100%			Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perkawinan	100%		
		Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perceraian	100%			Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perceraian	100%		
		Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte kematian	100%			Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte kematian	100%		
	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	100%	96.467.901	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	100%	10.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok	96.467.901	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok	10.000.000	
	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan			Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan			

	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil			Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil			
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota	-		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota	-		
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	-		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	-		
	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Keg	2.213.601	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Keg	1.500.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	1 Lap	2.213.601	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan			
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Lap	1.500.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	69.660.750	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	25.000.000	
	Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	100%	41.651.750	Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	100%	3.000.000	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dok	17.625.500	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dok	3.000.000	
	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Lap	24.026.250	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			
	Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Dok	8.733.750	Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Dok	5.000.000	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dok	8.733.750	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dok	5.000.000	
	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	100%	15.200.000	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	100%	17.000.000	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Lap	15.200.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Lap	10.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	1 Dok	7.000.000	
	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	4.075.250	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Lap	4.075.250	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	13.490.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	13.490.000	
	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	13.490.000	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	13.490.000	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dok	13.490.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dok	13.490.000	

Keterangan :

- Kolom Rancangan Awal RKPD : Data Renja PD Tahun 2022 sesuai Renstra
- Kolom Hasil Analisis Kebutuhan : Data Renja PD berdasarkan analisis Kebutuhan PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Tetapi dalam hal ini Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tidak memiliki usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun
2026
Kabupaten Bangkalan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Orang	
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab Bangkalan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	
3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan	
4	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab Bangkalan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019, adalah :

"Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas".

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan;
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk

Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan adalah :

"Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029, adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan Tahun 2026 adalah :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

b. Sasaran :

“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Dan

“Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Asta Cita yang ke - 4 yaitu : “ Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas “

Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Nawa Bhakti Satya

ke – 6 yaitu : “JATIM BERKAH – AMANAH”

Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan, Panca Dhama Prasetya ke – 4 , yaitu : Bangkalan Melayani.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2025	2026			2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	92	92,5	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74.9	75	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,7	99,8	
					Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	100	100	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan Masyarakat	86	87	
					Nilai SAKIP	61.5	62	

3.3. Program dan Kegiatan mendukung Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pelayanan Kesekretariatan, bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelatanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan.

Dalam mendukung tujuan dan sasaran diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2026 melalui rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengimplementasikan melalui 5 program, 15 kegiatan, dan 32 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.787.958.385,- yang bersumber dari APBD dan Dana Earmark Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 sebagai berikut:

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 (Menyesuaikan kebijakan baru dari PERMENDAGRI 050 Tahun 2021) adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat- Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
 - b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
 - b. Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

C. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - a. Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil

D. Program Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

E. Program Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Proritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung Program kegiatan Bapperida Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi nolenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas.;
2. Prioritas Provinsi: Jatim Berkah Amanah Penyelenggaraan pemerintah yang bersih efektif dan anti korupsi;
3. Prioritas Kabupaten: Penyelenggaraan birokrasi berkualitas, inovatif, melayani, transparan & anti-korupsi, terwujudnya Masyarakat Religius, Harmonis & Anti Narkoba melalui Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi, Keadilan, Memperkokoh Ideologi Pancasila & Demokrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- B. Program Pendaftaran Penduduk
 - 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2. Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusuna Profil Kependudukan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	Kab. Bangkalan	78	5.130.215.175	DAU		78	5.130.215.175
2.12.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	11.389.552	DAU		100%	11.389.552
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dok	2.953.300	DAU		3 Dok	2.953.300
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.200.150	DAU		1 Dok	1.200.150
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.089.250	DAU		1 Dok	1.089.250

2.12.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%	500.000	DAU		100%	500.000
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	42 Lap	500.000	DAU		42 Lap	500.000
2.12.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	39.957.550	DAU		100%	39.957.550
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	922.400	DAU		2 Paket	922.400
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	12.515.800	DAU		5 Paket	12.515.800
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	779.350	DAU		2 Paket	779.350
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	1.000.000	DAU		2 Paket	1.000.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	38 Lap	24.740.000	DAU		38 Lap	24.740.000
2.12.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	1.702.750	DAU		100%	1.702.750

2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Unit	1.702.750	DAU		2 Unit	1.702.750
2.12.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkalan	100%	872.308.700	DAU		100%	872.308.700
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Lap	1.994.700	DAU		2 Lap	1.994.700
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	122.454.000	DAU		12 Lap	122.454.000
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	747.860.000	DAU		12 Lap	747.860.000
2.12.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	118.494.482	DAU		100%	118.494.482
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	18 Unit	111.094.482	DAU		18 Unit	111.094.482
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangkalan	29 Unit	7.400.000	DAU		29 Unit	7.400.000

2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-			-	-
2.12.02	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El	Kab. Bangkalan	99.5%	109.253.210	DAU		99.5%	109.253.210
		Persentase kepemilikan KIA	Kab. Bangkalan	63%				63%	
2.12.02.2.01	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan	100%	66.219.400	DAU		100%	66.219.400
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	15.000.000	DAU		1 Dok	15.000.000
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	5 Dok	51.219.400	DAU		5 Dok	51.219.400
2.12.02.2.02	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak			-				-
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		-	-			-	-

2.12.03.2.03	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan	4 Keg	43.033.810	DAU		4 Keg	43.033.810
2.12.03.2.03.0007	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	18 Orang	21.001.300	DAU		18 Orang	21.001.300
2.12.03.2.03.0008	Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan	1 Lap	22.032.510	DAU		1 Lap	22.032.510
2.12.03.2.03.0009	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk							
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	Kab. Bangkalan	97.25%	1.510.000.000	DAU/ DAU Earmark		97.25%	1.510.000.000
		Persentase penerbitan akte perkawinan	Kab. Bangkalan	100%				100%	
		Persentase penerbitan akte perceraian	Kab. Bangkalan	100%				100%	
		Persentase penerbitan akte kematian	Kab. Bangkalan	100%				100%	
2.12.03.2.01	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	Kab. Bangkalan	100%	10.000.000	DAU		100%	10.000.000

2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000
2.12.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan			-				-
2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil							
2.12.03.2.02.0011	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota			-				-
2.12.03.2.02.0012	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil			-				-
2.12.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	2 Keg	1.500.000.000	DAU Earmark		2 Keg	1.500.000.000
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan							

2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Kab. Bangkalan	1 Lap	1.500.000.000	DAU Earmark		1 Lap	1.500.000.000
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	100%	25.000.000	DAU		100%	25.000.000
2.12.04.2.01	Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	Kab. Bangkalan	100%	3.000.000	DAU		100%	3.000.000
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	3.000.000	DAU		1 Dok	3.000.000
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah							
2.12.04.2.02	Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	Kab. Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2.12.04.2.03	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	Kab. Bangkalan	100%	17.000.000	DAU		100%	17.000.000

2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Lap	10.000.000	DAU		18 Lap	10.000.000
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAU		1 Dok	7.000.000
2.12.04.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-				-
2.12.04.2.04.0001	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			-				-
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	100%	13.490.000	DAU		100%	13.490.000
2.12.05.2.01	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 Jenis	13.490.000	DAU		1 Jenis	13.490.000
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Bangkalan	1 Dok	13.490.000	DAU		1 Dok	13.490.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance*.

Rencana program dan kegiatan serta lokasi pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2026. Begitu pula dengan total pagu program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2026.

Pencantuman Indikator serta Target Kinerja pada Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah konsisten dengan RKPD Tahun 2026.

Program dan Kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.